



# **WALIKOTA KEDIRI**

## **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT**

### **WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

-2-

7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT .

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah belanja bantuan keuangan kepada masyarakat kelurahan melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk yang penggunaannya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.
6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah menerima usulan, aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota legislatif Kota Kediri.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### Pasal 2

Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan produktifitas masyarakat melalui :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat ;
- b. Peningkatan kreativitas masyarakat ;
- c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik ;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

### **BAB III**

## **SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Sasaran dari pelaksanaan bantuan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan masyarakat ;

**-3-**

- b. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat ;
- c. Meningkatnya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan ;
- d. Meningkatnya partisipasi / swadaya masyarakat setempat dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan ini meliputi :

- a. Sarana prasarana fisik lingkungan dan fasilitas umum lain sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas ;
- b. Infrastruktur yang memperlancar ekonomi masyarakat secara luas ;
- c. Perbaikan / rehab rumah tidak layak huni sesuai aspirasi masyarakat.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN PENDEKATAN**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan bantuan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (acceptable) ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) ;
- c. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (accountable) ;
- d. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan bantuan ini memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang ditetapkan;
- b. Otonomi Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;

- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

-4-

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

*Bagian Kesatu*

Pola Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam satu kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

*Bagian Kedua*

Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembentukan Kelompok masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat

kelurahan setempat untuk memilih Kepengurusan yang terdiri dari :  
1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) Orang Bendahara dan 2 (dua) Orang Anggota.

- (2) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

-5-

- (3) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Usulan Jenis Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Usulan jenis pekerjaan merupakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat serta Lurah setempat.
- (2) Usulan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

Paragraf 3

Pengajuan Proposal

Pasal 12

Proposal Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui jaring aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif diajukan oleh Kelompok Masyarakat kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

### **Bagian Ketiga**

Mekanisme Realisasi Bantuan

Pasal 13

Realisasi bantuan stimulan dibagi dalam 3 (tiga) Tahap

- (1) Pencairan Bantuan Tahap I sebesar maksimal 40% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :
  - a. Proposal Kelompok Masyarakat, terdiri dari :
    - Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran I) ;
    - Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran II) ;

- Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat (Lampiran III dan Lampiran IV) ;
- Rincian Anggaran Biaya (Lampiran V) ;
- Foto Fisik 0 %.

Proposal dibendel sebanyak 3 (tiga) rangkap dikirimkan kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap I, terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana Tahap I sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;

**-6-**

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
- Perincian Penggunaan Dana Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
- Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Pencairan Bantuan Tahap II sebesar 30% dari Rincian Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :

a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I yang terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) tindasan atau Foto Copy.

b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap II, terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana Tahap II sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
- Perincian Penggunaan Dana Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
- Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Pencairan Bantuan Tahap III sebesar 30% dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau sisa dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang belum diambil pada Pencairan Bantuan Tahap I dan Tahap II, dengan kelengkapan :
- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II yang terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) tindasan atau Foto Copy.
  - b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap III, terdiri dari :
    - Kwitansi Pengajuan Dana Tahap III sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;

**-7-**

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap III sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
- Perincian Penggunaan Dana Tahap III sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
- Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

#### Pasal 14

- (1) Penerima bantuan stimulan adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat dengan penanggung jawab ketua kelompok masyarakat dan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat.
- (2) Biaya pengelolaan maksimal 2,5% (dua koma lima prosen) dari dana Jaring Aspirasi Masyarakat dan atau didanai dari Swadaya Masyarakat setempat.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2).
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Walikota Kediri.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I, Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) Tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud terdiri dari :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran IX);
- Laporan Penggunaan Dana/Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran X) ;
- Kwitansi / Bukti Pembelian (Lampiran XI) ;
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Ongkos Pekerja (Lampiran XII) ;
- Laporan Prosentase Prestasi Pekerjaan/Fisik, Tahap I minimal 30%, Tahap II minimal 60% dan Tahap III 100%(Lampiran XIII) ;
- Foto Kemajuan Fisik, Tahap I minimal 30%, Tahap II minimal 60% dan Tahap III 100% ;
- Foto Copy SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak.

**-8-**

Kelengkapan – kelengkapan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Tindasan / Foto Copy dan dibendel atau disnelhecter.

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan ini adalah Bendahara Kelompok Masyarakat.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan / pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

## **BAB VIII**

### **BIAYA**

Pasal 17

Membebankan kegiatan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**-9-**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 April 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di K e d i r i  
Pada tanggal 19 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

ttd

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 17